

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jl. Lumba-lumba Kel Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna

Nomor Telepon : 2523662

Penjelasan Umum : Laporan pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bahteramas Raha disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2021:A.Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. B.Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas;C.Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite;D.Penanganan Benturan Kepentingan;E.Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern;F.Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern;G.Batas Maksimum Pemberian Kredit;G.Batas Maksimum Pemberian Kredit;H.Rencana Bisnis BPR;I.Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan;J.Kepemilikan Saham Anggota Direksi Serta Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR;K.Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas serta Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR;L.Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas;M.Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah Dalam Skala Perbandingan;N.Penyimpangan Intern yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR;O.Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR;P.Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana.Q.Overview Hasil Penilaian Tata Kelola Secara Self Assessment.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	RUSDI, SE	Direktur Utama	Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PD BPR Bahteramas, antara lain :a.Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan;b.Mengelola PD. BPR Bahteramas Raha sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PD. BPR Bahteramas dan peraturan perundang-undangan;c.Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PD. BPR Bahteramas Raha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;d.Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: 1.Fungsi audit intern;2.Fungsi manajemen risiko; dan3.Fungsi kepatuhan;e.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;f.Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:1.pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan 2.Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain;g.Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;h.Mengungkapkan kebijakan PD BPR Bahteramas Raha yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;i.Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	ISNANINGSIH, SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PD BPR Bahteramas, antara lain :a.Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan;b.Mengelola PD. BPR Bahteramas Raha sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PD. BPR Bahteramas dan peraturan perundang-undangan;c.Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PD. BPR Bahteramas Raha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;d.Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: 1.Fungsi audit intern;2.Fungsi manajemen risiko; dan3.Fungsi kepatuhan;e.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;f.Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:1.pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan 2.Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain;g.Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;h.Mengungkapkan kebijakan PD BPR Bahteramas Raha yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;i.Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama Tahun 2021 Direksi telah menindaklanjuti Rekomendasi Dewan Pengawas diantaranya:1. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi pejabat eksekutif Audit Internal dan menyelesaikan komitmen temuan pemeriksaan OJK sultra.2. Direksi berusaha untuk selalu bekerja sesuai pedoman yang ada, meningkatkan kedisiplinan masuk kerja dan mengisi kekosongan Jabatan Pada Manager Pemasaran;3. Direksi telah berhasil meningkatkan Outstanding Kredit dengan meningkatkan Kredit Konsumtif dari Jasa sertifikasi Guru dan jasa TPP Pegawai Negeri Sipil; 4.Direksi telah melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah diataranya melalui Pengadilan dan Badan Lelang;5. Direksi slalu memperhatikan pentingnya penerapan APU PPT yang baik untuk mencegah risiko BPR digunakan sebagai saranaPencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rekomendasi Dewas untuk mengisi kekosongan Jabatan telah dilaksanakan yaitu dengan mengangkat Manager Pemasaran namun masih ada Jabatan yang masih kosong yaitu Manager Operasional, dikarenakan untuk efisiensi Biaya dan untuk sementara Tugas Manager Operasional masih bisa di kerjakan oleh Direktur Operasional.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Yusuf Montundu SE Msi	Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PD BPR Bahteramas, antara lain :a.Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.c.Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.d.Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional, kecuali terkait dengan:1.penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit; dan 2.hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. e.Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. f.Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1.pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2.keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha;

## Rekomendasi Kepada Direksi

Selama Tahun 2021, Dewan Pengawas telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi:1.Memastikan bahwa direksi Telah menindaklanjuti rekomendasi pejabat eksekutif audit internal serta Penyelesaian Komitmen Temuan Pemeriksaan OJK Sultra ;2.Memastikan Direksi dan karyawan agar selalu berpedoman pada ketentuan yang ada, memperhatikan kedisiplinan masuk kerja, mengisi kekosongan jabatan,melakukan penambahan karyawan khususnya bagian Account Officer;3.Memastikan Direksi untuk meningkatkan outstanding Kredit dengan mencari segmen pasar yang lebih baik dengan tetap berpedoman pada prinsip Kehati-hatian, 4.Memastikan bahwa Direksi telah Melakukan Upaya penyelesaian Kredit Bermasalah;5.Memastikan Direksi memperhatikan pentingnya penerapan APU PPT yang baik mengingat dunia Perbankan sangat sensitif untuk dijadikan sebagai tempat Pencucian Uang dan sebagai tempat pendanaan Terosisme

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	RUSDI, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	ISNANINGSIH, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	RUSDI, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	ISNANINGSIH, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Yusuf Montundu SE Msi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Yusuf Montundu SE Msi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	117823000	1	24603000
2	Tunjangan	0	83298000	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	<b>Total</b>		<b>201121000</b>		<b>24603000</b>

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Menyetujui pemberian Fasilitas bagi pengurus PD. BPR Bahteramas Raha Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, serta Fasilitas lain sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Semua akan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan Kemampuan Perusahaan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Direktur Utama mendapat fasilitas Perumahan dinas, sedangkan Direktur Operasional mendapat Pengganti sewa Rumah	Tidak ada
2	Transportasi	Direktur Utama mendapat Fasilitas kendaraan Berupa Mobil Dinas	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Direksi mendapat Tunjangan kesehatan melalui BPJS Kesehatan	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Menyetujui pemberian Fasilitas bagi pengurus PD. BPR Bahteramas Raha Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, serta Fasilitas lain sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Semua akan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan Kemampuan Perusahaan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,22	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,33	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,16	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,96	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	06-12-2021	3	Materi pembahasan yaitu : 1. Pemaparan Kinerja PD. BPR Bahteramas Raha sd Mei 2021, 2. Dewan Pengawas Merekomendasikan Peningkatan Outstanding Kredit dengan cara mencari segmen pasar yang lebih baik, mengisi kekosongan Jabatan. 3. Menjaga Kualitas Aktiva Produktif memperhatikan system kehati-hatian dalam penyaluran kredit dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, selalu memberikan pengarahannya demi Peningkatan Kinerja Karyawan, meningkatkan kesiapan serta dalam pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha PD BPR Bahteramas Raha agar senantiasa berkoordinasi dengan dewan pengawas serta peningkatan pemahaman karyawan mengenai APU PPT
2	08-01-2021	2	Materi Pembahasan yaitu : 1. Pemaparan Kinerja Pd. BPR Bahteramas Raha sd Juni 2021, 2. Strategi untuk menurunkan Rasio kredit bermasalah(NPL), 3. Merekomendasikan kepada Direksi agar segera menyelesaikan Laporan Penunjukkan KAP kepada OJK dan membahas Laporan Untuk Evaluasi Pengawasan Rencana Bisnis 4. Pemahaman terhadap APU PPT agar terus di tingkatkan
3	10-09-2021	3	Materi Pembahasan yaitu : 1. Komitmen Penyelesaian Kredit bermasalah, 2. Pembahasan Komitmen Perbaikan Kinerja untuk mencapai target bulan September sd Desember 2021, 3. Pembahasan Tentang pentingnya penerapan APU PPT Yang baik bagi Direksi dan Karyawan
4	11-10-2021	3	Materi Pembahasan Yaitu : 1. Komitmen Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Upaya peningkatan Outstanding Kredit untuk mencapai target Desember 2021, 2. Membahas tentang kinerja pejabat Eksekutif agar lebih memperhatikan tugas dan Tanggung Jawabnya, 3. Membahas tentang Kesejahteraan Karyawan, 4. Pengadministrasian Jaminan yang baik dan 5. Penerapan APU PPT yang baik bagi Direksi dan Karyawan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Pengawas PD. BPR Bahteramas Raha selama Tahun 2021 terdiri dari 2 Orang mulai bulan Mei 2021 dan baru berjalan kurang lebih 2 Bulan salah satu Dewan Pengawas Meninggal Dunia sehingga Sejak Bulan Juli 2021 Dewan Pengawas PD BPR Bahteramas Raha hanya tersisa 1 Orang. Rapat dalam setahun yaitu 4 kali yang turut di hadiri oleh Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Yusuf Montundu SE Msi	3	1	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2021 telah dilakukan Rapat sebanyak 4 Kali yang terdiri dai 1 Kali melalui ZOOM Metteng dan 3 Kali dilakukan Rapat secara langsung. Karena Dewan Pengawas hanya berjumlah 1 Orang, maka Rapat Dewan Pengawas selalu dialukan bersama Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210218	Kegiatan Sosial	Kegiatan MTQ antar Kecamatan	Kecamatan Batalaiworu	500.000
2	20210419	Kegiatan Sosial	Sumbangan Cat untuk Masjid	Pengurus Masjid	500.000
3	20210428	Kegiatan Sosial	Sumbangan buka Puasa untuk siswa pesantren	Pengurus pesantren	337.000
4	20210504	Kegiatan Sosial	Sumbangan sembako ke masyarakat kurang mampu	Masyarakat	5.550.900
5	20210510	Kegiatan Sosial	Sumbangan sembako kemasyarakat kurang mampu	Masyarakat	529.000
6	20211022	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke anggota pramuka Tuna Rungu	Masyarakat	100.000
7	20210831	Kegiatan Sosial	Sumbangan Buku Yasin dan Alat Sholat ke Masyarakat	Panitia Acara	4.250.000
8	20210831	Kegiatan Sosial	Sumbangan Kegiatan Ekspose pembangunan Muna	Panitia Acara	1.995.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PD. BPR Bahteramas Raha
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl. Lumba-lumba Kel Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna
Nomor Telepon	: 2523662
Modal Inti BPR	: 8.401.188.845,00
Total Aset BPR	: 10.992.495.136,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Hasil Self Assesment GCG Tahun 2021 menunjukkan Kategori baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. BPR bahteramas Raha akan tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk mencapai penerapan TataKelola yang baik di Tahun 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah Anggota Direksi 2 Orang dan Salah Satunya yaitu Direktur Operasional Bertindak sebagai Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Direksi Bertempat Tinggal Di Kota/Kabupaten yang sama dengan Kantor Pusat
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh Direksi tidak Merangkap Jabatan di perusahaan lain, Namun Direktur Utama merupakan Sekretaris Umum dari asosiasi PERBAMIDA
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lain atau Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat khusus
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh Direksi telah lulus Uji kemampuan dan kepatuhan. Perpanjangan Masa Jabatan Direksi telah di tetapkan melalui RUPS 2018 Tahun Buku 2017 sebelum berakhirnya Masa Jabatan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	3	Direksi pernah memberi kuasa kepada manajer namun yang sifatnya terbatas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi telah Menindak lanjuti Temuan Audit dan Rekomendasi Audit Internal dan Audit Eksternal, Namun ada satu hasil temuan dari pengawasan OJK yang belum terrealisasi
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi selalu memberikan laporan Kepada Dewan pengawas
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Direksi setiap pengambilan keputusan dalam rapat selalu dilakukan secara musyawarah
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR Untuk kepentingan pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Direksi terkadang memberikan pelatihan kepada staff tentang perbankan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Dirksin cukup mampu menerapkan prinsip Kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Pedoman dan tata tertib Direksi belum sepenuhnya dilaksanakan
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	2,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,05	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Setiap tahun Direksi menyelenggarakan RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan terkait Pegawai selalu diumumkan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Setiap hasil keputusan Rapat Direksi selalu membuatkan risalah rapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Terkadang terjadi peningkatan dan Penurunan hasil Kinerja
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan Laporan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan dan Media
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	Jumlah Dewan Pengawas satu orang disebabkan karena salah satu dewan pengawas telah meninggal dunia dan Sd 31 Desember 2021 belum ada pengganti dewan pengawas yang baru.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Dewan Pengawas tidak melampaui Jumlah Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan kepatutan dan telah di angkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Dewan Pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor pusat
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Pengawas telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan namun bekerja pada Instansi lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Pengawas tidak memiliki Hubungan Keluarga

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Pengawas selalu memberikan nasehat kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Pengawas selalu Mengevaluasi kebijakan yang berlaku
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Pengawas tidak terlibat dalam Pengambilan Keputusan Operasional kec. Yang Berhubungan dengan Kebijakan Strategis
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Pengawas selalu meminta draf hasil temuan Pemeriksaan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Pengawas Mengadakan rapat Bersama

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan rapat dewan pengawas dilakukan secara musyawarah
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Pengawas selalu melakukan pemantauan
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil Rapat Dewan Pengawas selalu dibuatkan Risalah rapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Selalu dimusyawarakan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Selalu dimusyawarakan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;  dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direksi yang Membawahi fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Belum Sepenuhnya memahami
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Direksi telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang Membawahi fungsi Kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang Membawahi fungsi Kepatuhan belum Sepenuhnya melaksanakan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	BPR telah memiliki ketentuan Intern
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan Langkah-langkah yang diperlukan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Telah melakukan Sosialisasi
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi membawahi fungsi Kepatuhan Telah Melakukan Pemantauan dan Menjaga Kepatuhan terhadap seluruh Komitmen kepada ojk
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan telah Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha telah sesuai ketentuan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan telah merevidi namun belum maksimal
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Belum Sepenuhnya terlaksanakan

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Belum Sepenuhnya terlaksanakan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Belum menyampaikan Laporan Khusus karena belum ada keputusan Direksi yang dianggap menyimpang
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah mengangkat PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai ketentuan yang berlaku
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE Audit intern Independen terhadap satuan kerja Operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	PE Audit intern Independe bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPR Belum memiliki
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR Telah Menerapkan fungsi Audit intern sesuai ketentuan pedoma audit yang telah disusun oleh BPR

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Kurang dari Rp. 50 Miliar
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR telah mengikutsertakan Pelaksanaan fungsi audit intern pada Pelatihan-pelatihan terkait dengan penerapan fungsi Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern Kepada Dirut dan Dewas dengan tembusan ke direktur Kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan lapora pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK dan belum menyampaikan laporan khusus karena belum terdapat penyimpangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Kurang dari Rp. 50 Miliar

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan KAP Telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar Akuntan publik dan komunikasi antara OJK dan KAP
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Akuntan Publik dan KAP yang telah ditunjuk oleh BPR terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Hasil Audit KAP dan Management Letter telah disampaikan kepada otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit dan Manajemen Letter telah sesuai dan disampaikan tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil Audit telah sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah menunjukkan seorang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR telah memiliki Kebijakan Prosedur, dan penetapan limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	5	Sementara Proses
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	BPR telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	5	Sementara Proses
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR Melakukan proses identifikasi dan pengendalian risiko terhadap faktor risiko terhadap faktor risiko yang bersifat material
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	5	diterapkan
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menerapkan atas seluruh risiko sesuai ketentuan yang diwajibkan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	5	Sementara Proses
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	5	Sementara Proses
	Total nilai skala penerapan	29	
	Rata-rata	4,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,66	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun Laporan Profil Risiko tahun 2021
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	Sementara Proses
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sitem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termaksud pemberian kredit terhadap pihak terkait
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR selalu mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPK
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Pemberian kredit selalu mengacu pada Ketentuan OJK mengenai BMPK dan prinsip Kehati-hatian
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Belum Membuat Laporan karena belum terdapat pemberian kredit kepada pihak terkait yang melanggar dan atau melampaui BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR telah disusun dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR telah disusun sesuai ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis BPR telah mendapat dukungan Oleh Pemegang Saham
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis disusun sesuai ketentuan OJK
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Pengawas selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis telah disampaikan pada OJK sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	SDM diberi pelatihan yang baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan Publikasi sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan Melaporkan Laporan Tahunan sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Melaksanakan Transparansi informasi sesuai ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Menyusun dan menyajikan Laporan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Menyusun dan menyajikan Laporan Publikasi dan menyampaikan kepada OJK/Publikasikan sesuai ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	BPR Menyusun dan menyajikan Laporan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PD. BPR Bahteramas Raha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



**LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**  
**PD BPR BAHTERAMAS RAHA**  
**TAHUN 2021**

Raha 25 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:

**Rusdi, SE**  
Direktur Utama



**PD. BPR BAHTERAMAS  
RAHA**

**Yusuf Montundu SE, MSI**  
Komisaris



## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PD BPR Bahteramas Raha  
Alamat : Jl. Lumba-Lumba Kelurahan Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna  
No Telp : 0403 2523662  
Posisi Laporan : Tahun 2021  
Modal Inti : Rp 8.401.188.845,-  
Total Aset : Rp 10.992.495.136,-  
Status Audit : Di Audit KAP  
Bobot BPR : B  
Nilai Komposit : 1.92  
Peringkat Komposit : Baik

### KESIMPULAN

Hasil Self Assesment GCG tahun 2021 menunjukkan kategori baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Bank akan tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan di tahun 2022 untuk mencapai penerapan tata kelola yang lebih baik.

Raha, 25 April 2022



**R u s d i, SE**  
Direktur Utama



PD. BPR BAHTERAMAS  
RAHA



**Yusuf Montundu SE, MSi**  
Komisaris